



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP.007/M.PPN/02/2005

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam yang melanda Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan berat baik infrastruktur, ekonomi, pemerintahan maupun masyarakat daerah tersebut;
 - b. bahwa penanganan daerah yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama serta formulasi strategi perencanaan yang komprehensif agar rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dapat berhasilguna dan berdayaguna;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas perlu dibentuk Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang terdiri atas pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai mana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang terdiri atas Tim Pengarah, Ketua/Wakil Ketua Tim Pelaksana serta Kelompok Kerja-Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : (a) Tim Pengarah bertugas :

1. Melakukan koordinasi antar sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara baik dari segi ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan maupun sosial kemasyarakatan lainnya;
2. Memberikan arahan kebijakan, koordinasi atas bantuan pihak asing baik bilateral maupun multilateral dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara;
3. Mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara;
4. Mengadakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas secara berkala.

(b) Tim...

(b) Tim Pelaksana bertugas :

1. Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja bagi rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang meliputi bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan lainnya;
2. Memberikan bahan masukan untuk formulasi kerangka kebijakan dan strategi pemanfaatan bantuan asing baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Mengkoordinasikan kerjasama antar departemen/lembaga terkait dalam rangka perolehan masukan dan informasi bagi formulasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana;
4. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas seluruh kelompok kerja dalam rangka mensinergikan dan mengoptimalkan hasil penyusunan perencanaan dari setiap kelompok kerja;
5. Mengkoordinasikan dan mensinergikan substansi yang disusun kelompok kerja serta melakukan koordinasi dengan expert asing;
6. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dalam program dan rencana kerja yang telah ditetapkan;
7. Melaporkan kepada Tim Pengarah mengenai hasil-hasil pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

KETIGA : Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana, keanggotaan Kelompok Kerja terdiri dari pejabat dan staf Kementerian Negara PPN/Bappenas beserta pejabat dan staf dari lingkungan kementerian/lembaga terkait lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Uraian tugas Kelompok Kerja tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KELIMA : Apabila dipandang perlu Kelompok Kerja dapat melibatkan wakil dari lembaga non-pemerintah yang terkait untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana.

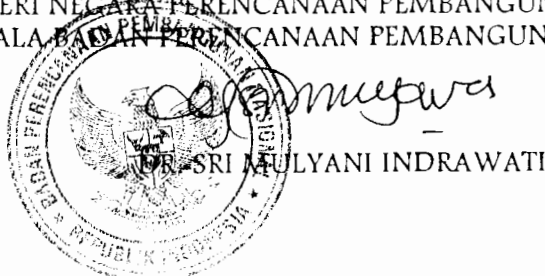
KEENAM : Ketua Tim Pelaksana membentuk Sekretariat Tim yang terdiri atas pejabat dan staf Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana termasuk menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana secara berkala antara lain untuk:...

untuk keperluan rapat dengan instansi pemerintah terkait, donor, dan media massa, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.

- KETUJUH : Dalam hal terdapat perubahan nama dalam keanggotaan Kelompok Kerja, dapat ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah atas persetujuan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KEDELAPAN : Apabila diperlukan Anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana beserta Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim dapat memantau dan mengunjungi langsung daerah yang terkena bencana, maupun bekerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian di bidang-bidang terkait dalam rangka merumuskan kebijakan, strategi dan rencana kerja program rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.
- KESEMBILAN : Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya di tingkat daerah, maka apabila diperlukan Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dapat membentuk kantor perwakilan Tim Koordinasi di tingkat daerah.
- KESEPULUH : Struktur organisasi dan mekanisme hubungan kerja dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara sesuai dengan struktur organisasi Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, seperti tercantum dalam Lampiran III.
- KESEBELAS : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEDUABELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 001/M.PPN/01/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGABELAS : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1. Februari 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
3. Inspektur Utama Bappenas;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN IA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 007/M.PPN/02/2005

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA
KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- Wakil/Ketua : (1) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
(2) Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
- Anggota : (1) Sekretaris Meneg. PPN/Sestama Bappenas;
(2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
(3) Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan;
(4) Deputi Bidang Ekonomi;
(5) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
(6) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
(7) Inspektur Utama Bappenas;
(8) Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang;
(9) Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan;
(10) Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan Hak Azasi Manusia;
(11) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial;

B. Tim...

B. TIM PELAKSANA

Ketua: Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;

Wakil Ketua: (1) Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;
(2) Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

Kelompok Kerja:

1. Tata Ruang dan Pertanahan:

Ketua: Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal;

Wk. Ketua: Direktur Perkotaan dan Perdesaan;

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Ketua: Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

Wk. Ketua: Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;

3. Prasarana dan Sarana

Ketua: Direktur Pengairan dan Irigasi;

Wk. Ketua: Direktur Permukiman dan Perumahan;

4. Ekonomi dan Ketenaga kerjaan

Ketua: Direktur Ketenagakerjaan dan Analisa Ekonomi;

Wk. Ketua: Direktur Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi;

5. Sistem Kelembagaan

Ketua: Direktur Pengembangan Otonomi Daerah;

Wk. Ketua: Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah;

6. Sosial, Budaya, dan Sumber Daya Manusia

Ketua: Direktur Kesehatan dan Gizi;

Wk. Ketua: Direktur Agama dan Pendidikan;

7. Hukum

Ketua: Direktur Hukum dan Hak Azasi Manusia;

Wk. Ketua: Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;

8. Pemulihan Ketertiban, Keamanan, dan Rekonsiliasi

Ketua: Direktur Politik, Komunikasi, dan Informasi;

Wk. Ketua: Direktur Pertahanan dan Keamanan;

9. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

Ketua: Direktur Aparatur Negara;

Wk. Ketua: Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;

10. Pemulihan Sistem dan Mekanisme Pendanaan

Ketua: Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan;

Wk. Ketua: Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan;

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



[Handwritten signature]
DR. SRIMULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IB
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 007/M.PPN/02/2005
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS)**

Bidang	Nama	Jabatan	Instansi
Tata Ruang dan Pertanahan	1. Dr. Ir. Herry Darwanto, MSc	Direktur pengembangan Kwsn Khusus & Tertinggal	Bappenas
	2. Dr. Ir. Rr. Penny K. Lukito, MCP	Direktur Perkotaan dan Perdesaan	Bappenas
	3. Dr. Vivi Yulaswati, MSc	Kasubdit Pengusahaan Hutan	Bappenas
	4. Drs. Dudi Djuhda Sastra almadja	Peneliti Madya	LIPI
	5. Ir. Tono Supranoto, SCS	Kabag Rehabilitasi	Sekretariat Bakornas PBP
	6. Ir. Ferrianto Djais M Sc	Direktur Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dep. Kelautan dan Perikanan
	7. Ir. Ansoni Zawawi	Kasubdit Tata Ruang Pesisir	Dep. Kelautan dan Perikanan
	8. Dr. Ir. Subandono, MEng	Kasubdit Mitigasi Lingkungan Pesisir	Dep. Kelautan dan Perikanan
	9. Ir. Sugiono, MURP	Kasubdit Penataan Ruang P3K	Dep. Kelautan dan Perikanan
	10. Djanal, SE, MSc	Karo Bina Program	BPS
	11. Drs. Edic Prihantoro, MSc	Peneliti Madya	Meneg Ristek
	12. Ir. Bambang Eko, H.N.	Direktur Pengukuran dan Pemetaan	BNP
	13. Drs. Hardjono, MS	Direktur Penatagunaan Tanah	BNP
	14. Ir. Heru Susanto	Kasubdit Pengukuran Tanah	BNP
	15. Mauritz F. M. Pasaribu, MRegSc	Peneliti Madya	Dep. Pekerjaan Umum
	16. Ir. Toto Hendroto M Si	Direktur Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat	Dep. Pekerjaan Umum
	17. Ir. Renyansih	Direktur Pembinaan Pengembangan Kawasan	Dep. Pekerjaan Umum
	18. Ir. Ruhyat Dcmi M Eng	Direktur Penataan Ruang Nasional	Dep. Pekerjaan Umum
	19. Ir. Firman Napitupulu MURP	Kasubdit Penataan Ruang pulau	Dep. Pekerjaan Umum
	20. Ir. Budi Situmeang MURP	Kasubdit Penyusunan RTRWN	Dep. Pekerjaan Umum
	21. Ir. Dading Sugandhi M.Sc	Kasubdit Keterpaduan Tata ruang Wilayah Tengah	Dep. Pekerjaan Umum
	22. Ir. Azwir Malan M.Sc	Kasubdit Kapet	Dep. Pekerjaan Umum
	23. Ir. Harry Djauhari CES	Kasubdit Keterpaduan Tata Ruang Wil. Timur	Dep. Pekerjaan Umum
	24. Ir. Iman Sudradjat MPM	Kasubdit Keterpaduan Tata Ruang Wil. Barat	Dep. Pekerjaan Umum
	25. Ir. Bahal Edison MT	Kasubdit Penataan Ruang Wilayah Barat I	Dep. Pekerjaan Umum
	26. Ir. Bambang Ismu Bagio MUP	Kasubdit Promosi Investasi	Dep. Pekerjaan Umum
	27. Ir. Amwazi Idrus M.Sc	Kabag. di Pusat Data dan Informasi	Dep. Pekerjaan Umum
	28. Dr. Toto Puntodewo SSO	Kapus Pemetaan Dasar dan Tata Ruang	Bakosurtanal
	29. Dr. Olan Tan Simonangkir	Karo Renum	Bakosurtanal
	30. Dr. PJ Prih Hajadi	Kepala Pusat Sisdstin Geofisika	Badan Meteorologi dan Geofisika
	31. Iman Santosa, MSc	Kapus Pengendalian Regional Wilayah I	Dep. Kehutanan
	32. Ir. Mudjihanto Somarmo, MM	Kapus Penatagunaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan	Dep. Kehutanan
	33. Ir. Adi Susmianto, MSc	Direktur Konservasi Kawasan	Dep. Kehutanan
	34. Drs. Heni Priantoro, MSc	Biro Perencanaan	Bakosurtanal
	35. Drs. Tuamin Mulyono	Biro Perencanaan	Badan Meteorologi & Geofisika
	36. Ir. Rath	Kepala Pusat Inderaja	LAPAN
	37. Ir. Bidawi Hasyim M.Sc	Peneliti Madya	LAPAN
	40. Dr. Ir. Abdul Kamarzuki MPM	Kabid Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia	Kantor Menko Perencanaan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA	1. Dr. Ir. Agus Prabowo (Ketua)	Direktur Pengendalian SDA dan LH	Bappenas
	2. Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA (Wk)	Direktur Kehutanan & Konservasi Smb Daya Air	Bappenas
	3. Ir. Wahyuningih Daradjati, MSc	Direktur Kelautan dan Perikanan	Bappenas
	4. Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc	Direktur Pangan dan pertanian	Bappenas
	5. Ir. Bemby Uripito, MSc	Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan	Bappenas
	6. Ir. Nita Kartika, MEC	Kasubdit Konservasi dan Rehabilitasi Hutan	Bappenas
	7. Ir. Nono Rusono, PG Dip Agr. Sc. Msi	Kasubdit Peternakan	Bappenas
	8. Dr. Adrin Tohari	Peneliti Utama	LIPI
	9. Dr. Ir. Subandono Diposantono, MEng	Kasubdit Mitigasi Lingkungan Pesisir	Dep. Kelautan dan Perikanan
	10. Ir. Agus Dermawan	Kasubdit Suaka dan Kawasan Konservasi Laut	Dep. Kelautan dan Perikanan
	11. Budi Sulistyio	Badan Riset Kelautan dan Perikanan	Dep. Kelautan dan Perikanan
	12. Drs. Riptono Sri Mahodo, MS	Direktur Penguasaan pertanahan	BNP
	13. Dr. Henry Bastaman	Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya	Kementerian Lingkungan Hidup
	14. Ir. Hj. Ati Wasiati	Direktur Perlindungan Tanaman	Dep. Pertanian
	15. Ir. Sukirno, MSi	Direktorat Perbenihan	Dep. Pertanian
Prasarana dan Sarana Umum	16. Ir. Yousana O.P. Siagian	Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Dep. ESDM
	17. Dr. Ir. A. Djumarna Wirakusumah	Direktur Tata Lingkn Geologi dan Kawasan Pertambangan	Dep. ESDM
	18. Hardoyo Rajiyowiryo		Dep. ESDM
	19. Drs. Widodo Ramono	Direktur Konservasi Sumberdaya Hayati	Dep. Kehutanan
	20. Ir. Wahyono Supatrio	Kabid Evaluasi Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	Dep. Kehutanan
	21. Dr. Harry Santoso, MSc	Kapus Pengendalian Regional Wilayah I	Dep. Kehutanan
	22. Ir. Mukaryanti, MSc	Dit. Teknologi Lingkungan	Kementerian Ristek/BPPT
	23. Ir. Dodi Slamet	Dit. Pengembangan Wilayah	Kementerian Ristek/BPPT
	24. Dr. Ir. Agus Kristijono, MSc	Dir. Pst. Pengkajian & penerapan Teknlg Pengelolaan SD Lahan Kawasan	Kementerian Ristek/BPPT
	1. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA (Ketua)	Direktur Pengairan dan Irigasi	Bappenas
	2. Ir. Basah Hernowo, MA (Wk)	Direktur Permukiman dan Perumahan	Bappenas
	3. Ir. Gumilang Hardjakoesoma, MSc	Direktur Energi, Telekomunikasi & Informatika	Bappenas
	4. Ir. Ferrius Sugiono, MSc	Direktur Transportasi	Bappenas
	5. Drs. Darodono, MA	Direktur Pengembangan Kelengkapan Prasarana Publik	Bappenas
	6. Ir. Amor Rio Sasongko, MScAgr	Kasubdit Konservasi Sumberdaya Air	Bappenas
	7. Ir. Monty Giriana, MSc, MCP, Ph D	Kasubdit Inveatasi Prasarana	Bappenas
	8. Ir. M. Dony Azdan, MA, MSc, h D	Kasubdit Sungai	Bappenas
	9. Ir. Budi Hidayat, M Eng Sc	Perencana Bidang Transportasi	Bappenas
	10. Ir. Jadhic J. Ardajat, M Si	Kasubdit Tenaga Listrik	Bappenas
	11. Dr. Ir. M. Rudy Salahuddin, MEM	Kasubdit Pos dan Telekomatika	Bappenas
	12. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP	Kasubdit Sanitasi Lingkungan	Bappenas
	13. Ir. Salura Widya, MA	Kasubdit Air Bersih	Bappenas
	14. Drs. Dedy Roosadiono, SE, MEC	Kepala Biro Perencanaan dan KLN	Dep. Pekerjaan Umum
	15. Ir. Sudarto	Direktur Bimtek Ditjen SDA	Dep. Pekerjaan Umum
	16. Ir. Bambang Goeritno, MSc, MPA	Direktur BinTek Ditjen Tata Perkotaan & Tata Perdesaan	Dep. Pekerjaan Umum

[illegible]

Bidang	Nama	Jabatan	Instansi
	26. Dr. Mukhlis Paeni 27. Drs. Max Turwattimaha, MSi 28. Drs. I Nyoman Meweh 29. Dr. Gunawan Setiadi, MPH 30. dr. Setiawan Suparan, MPH 31. dr. Dodi Indrasanto 32. Dr. Iman Dachlan, MPH 32. Dr. Amin Chaodari, MA 33. Drs. Zaenal Abidin Sjam, MM 34. Drs. Akhmad Lutfi 35. Hartono, SH, MSI 36. Drs. H.A. Chunaini Saleh 37. Drs. Djoni Djunarsa 38. dr. Wistianto, MPH 39. Dra. Farida Djoko, SKM	Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Perencanaan Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan Kepala Pusat Penanganan Masalah Kesehatan Kepala Pusat Data dan Informasi Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Bagais Kepala Biro Perencanaan Kabag Penyusunan Program Wilayah I Kabag Penyusunan Program Wilayah II Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Biro Perencanaan Kepala Biro Perencanaan Kepala Bagian Perencanaan	Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Dep. Sosial Kantor Menko Kesra Dep. Kesehatan Dep. Kesehatan Dep. Kesehatan Dep. Agama Dep. Agama Dep. Agama Dep. Agama Dep. Agama Badan Urusan Logistik Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Hukum	1. Diani Sadia Wati, SH, LLM (Ketua) 2. Ir. Slamet Soedarsono, MPP (Wk) 3. Drs. Sutrisno Djaja 4. Drs. Supadi, MSM 5. Indra Sakti, SH., MA 6. Halius Hosen SH 7. Agung Mulyana 8. Ir. Suhatmansyah 9. Ir. Sapto 10. Effendi, SH 11. Brigjen. Drs. Hari Soenanto, SH 12. Dr. Ramlan Ginting, SH, LLM 13. Mudjiono, SH 14. Dr. Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH 15. Drs. Lutfie Asiatro 16. Dra. Fadria Novari Manan 17. H. Parwoto Wigijusmarto, SH 18. Adrianus Meliala, MSi, MSc, PhD 19. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LLM 20. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo 21. Wiwi Awati, SH, MHum 22. Dr. Ningrum Sirait	Direktur Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum Kepala Biro Umum Kasie Nilai-nilai dan Kebijakan HAM Kepala Biro Perencanaan Sesditjen Administrasi Kependudukan Sesditjen PUM Kepala Pusat Kebijakan Strategis Direktur Hukum Pertahanan Wakadivbinkum Deputi Direktur Hukum Karo Perencanaan Direktur Perdata, Ditjen AHU Asdep Apresiasi Asdep Tradisi dan Nilai Budaya Kepala Direktorat Perdata Niaga Asisten Dekan Bidang Riset dan Publikasi, FISIP Dekan Fakultas Hukum Dosen Fakultas Hukum Dosen Fakultas Hukum Dosen Fakultas Hukum	Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas Kejaksanaan Agung Dep. Dalam Negeri Dep. Dalam Negeri Dep. Dalam Negeri BPN POLRI Bank Indonesia Dep. Hukum dan HAM Dep. Hukum dan HAM Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Mahkamah Agung UI UI UI UI USU
Pemulihan Ketertiban Keamanan, dan Rekonsiliasi	1. Drs. Freddy Herman Tulung, MUA (Ketua) 2. Ir. Rizky Ferianto, MA (Wk) 3. Drs. Otho Hermowo Hadi, MA 4. Dra. Rd. Siliwanti, MPIA 5. Bogat Widiyatmoko, SE, MA 6. Dr. Rusydi Syahra 7. Subagio Ms 8. Dr. A. Agus Sriyono 9. Sundawan Salya 10. Sumardi 11. Ir. M. Karim Mustari, MSP 12. Antonius Sunaryo 13. Brigjen TNI Adang Sondjaja 14. Kolonel Cba Lodeczk Rotty	Direktur Politik, Komunikasi, dan Informasi Direktur Pertahanan dan Keamanan Kasubdit Politik Luar Negeri Kasubdit Politik Dalam Negeri Kabag Strategi Pertahanan Kapus Penlit Kemasyarakatan & Kebudayaan Asdep Bid. Standar Layanan Informasi Poikam Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kasubdit 12.5, Deputi I Kabag Perenc. & Program, Biro Data, Perencanaan, & Org Sesditjen Kesbangpol Kepala Biro Perencanaan Direktur PKBN Ditjen Pothan Tafung. Gel. IV Dir PKBN Ditjen Pothan	Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas LIPI Kantor Meneg Kominfo Dep. Luar Negeri BIN Kantor Menko Polhukam Depdagri Dep. Pertahanan Dep. Pertahanan Dep. Pertahanan
Akuntabilitas dan Tata Kepemerintahan	1. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS (Ketua) 2. Drs. Setia Budi, MA (Wk) 3. Drs. Bagus Rumbogo, Ak 4. Ir. Hasan Iskandar, M Ec 5. Dr. Hekinus Manao, AK., M Acc 6. Andy Very Dharma, AK, M Acc 7. Ir. Togap Simangunsong, M App Sc 8. Iwan S. Rapi, Ak, MSc	Direktur Aparatur Negara Inspektur Bidang kelombagaan Inspektur Bidang Administrasi Umum AsDep urusan Pengawasan Fungsional Direktur Akuntansi dan Informasi Ditjen Perbendaharaan Kabag Evaluasi Perencanaan Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Kabag Sekretariat Pimpinan	Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas Kementerian PAN Dep. Keuangan BPKP Dep. Dalam Negeri BPK
Pemulihan Sistem dan Mekanisme Pendanaan	1. Drs. Anwar Sodik Santoso, MSi (Ketua) 2. Ir. Agus Rahardjo, MSM (Wk) 3. Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Kusumadilaga, MA 4. Dr. Slamet Sano Adji, MA 5. Ir. Benedictus Benny Setiawan, MSc 6. Ir. Agung Hardjono, MSEM, MSIS 7. Devina Nasution SH, M Si 8. Ir. Sn Widayani, MM 9. S. Happy Hardjo, SE, Mee 10. Drs. Parluhutan Hutahayan, MA 11. Dr. Dharma Bhakti 12. Ir. M. Rasyid, MSc 13. Ir. Sutirno 14. Drs. Mantaris Siagian	Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Direktur Pendanaan Luar Negeri dan Bilateral Direktur Analisa & Formulasi Pendanaan Pembangunan Direktur Pemantauan & Evaluasi Pendanaan Pembangunan Kapus Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kepala Biro Perencanaan dan Evaluasi Kepala Bagian Perencanaan Direktur Metodologi Statistik Direktur Anggaran I Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Peneliti Madya Direktur Bina Administrasi Keuangan Daerah Biro Perencanaan	Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas Bappenas Sekretariat Bakomas PBP Sekretariat Bakomas PBP BPS Dep. Keuangan Dep. Keuangan Kantor Meneg Rustek/BPPT Dep. Dalam Negeri Kantor Meneg BUMN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 007 /M.PPN/02/2005

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2005

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS)

I. Uraian Tugas Setiap Pokja:

- a. Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara Paska Bencana Alam yang langsung dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat (Action Plan).
- b. Mengkoordinasikan yang meliputi;
 - 1) pengintegrasian rencana dari sektor, pihak dunia usaha, dan masyarakat.
 - 2) sinkronisasi instrumen-instrumen pelaksanaan rencana dari berbagai pihak (pemerintah, Dunia usaha, masyarakat) terutama waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan lembaga/pelaksana.
- c. Melakukan sosialisasi, disseminasi dan penyebaran data dan informasi mengenai bencana alam, dampak, penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian kebutuhan dan informasi lainnya kepada masyarakat lokal, nasional dan internasional.
- d. Menggalang Solidaritas, Partisipasi dan Keterlibatan berbagai pihak di masyarakat (Civil Society) dalam Rencana dan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumut melalui upaya dialog-dialog perencanaan.
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber-sumber APBN, APBD, Masyarakat dan internasional serta penyalurannya sehingga terwujud sistem yang sederhana, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

II. Produk POKJA:

- a. Laporan Kemajuan Penanggulangan Paska bencana alam dan kajian dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta efektifitas terhadap kelompok sasaran dalam kerangka upaya penanggulangan dampak bencana tahap kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Penilaian...

- b. Penilaian tingkat dan besar kerusakan dan kerugian akibat bencana alam yang dievaluasi secara berkala.
- c. Penilaian tingkat dan besar kebutuhan untuk upaya kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi menurut sektor-sektor, wilayah dan menurut kelompok sosial.
- d. Penyebaran informasi, sosialisasi dan disseminasi melalui internet/website maupun melalui media lainnya.
- e. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara beserta dokumen pendukungnya.
- f. Penyiapan instrumen-instrumen peraturan, kelembagaan, mekanisme pendanaan, peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan rencana.
- g. Penggalangan solidaritas, partisipasi dan keterlibatan komponen-komponen masyarakat madani(civil society) dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui dialog perencanaan dan kerjasama.

III. Prinsip-Prinsip Dasar:

- a. Berorientasi pada masyarakat dan partisipatif – dengar dan mengerti perasaan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kembali.
- b. Pendekatan Menyeluruh dan Holistik – Pembangunan kembali berdasarkan penataan ruang dan penataan kawasan.
- c. Koordinasi yang efektif – Menjamin konsistensi dan keefektifan antara program sektoral dan regional di tingkat nasional, daerah dan lokal.
- d. Strategi yang jelas – Pembedaan yang jelas antara strategi rehabilitasi (pencapaian standar minimum) dan rekonstruksi pada masing-masing sektor.
- e. Peningkatan kemandirian (*Capacity building*) dalam pengaturan (governance), pengelolaan (management), dan pembiayaan (funding).
- f. Transparansi fiskal dan Pemantauan yang Efektif (*Fiscal Transparency and Effective monitoring and evaluation*) sebagai bagian dari desain program.

IV. Pendekatan dan Metodologi Perencanaan

- a. Integrasi tahapan penanggulangan antara tahap kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Membangun masyarakat Aceh melalui penguatan tatanan nilai Ke-Aceh-an, nilai religius, nilai ke-Indonesia-an dan nilai Kemanusiaan yang universal.
- c. Penataan ruang : pendekatan zonasi (zoning plan) dan regulasi (zoning, building and environmental criteria, design and codes).
- d. Pendekatan rencana menggunakan “action planning approach” dan langsung dapat dioperasionalkan oleh institusi dan masyarakat.
- e. Mekanisme pengendalian pendanaan dan penyaluran serta pemanfaatannya dengan penerapan “good governance” dan partisipasi masyarakat.

V. Tenaga...

V. Tenaga Ahli yang dibutuhkan

Tenaga ahli untuk:

- 1) Penilaian kerusakan dan kerugian (damage and loss assessment)
- 2) Bantuan teknis untuk penataan ruang, regulasi, kriteria dan disain.
- 3) Pengelolaan data citra satelit
- 4) Pengelolaan data spasial
- 5) Citra satelit pada 6 wilayah bencana (Satellite Imagery on 6 disaster areas).
- 6) Studi pemulihan hak atas tanah (Land rights recovery study).
- 7) Studi relokasi permukiman (Resettlements study).
- 8) Studi pemulihan lingkungan (Environmental recovery study ; mangrove, coral reefs, etc).
- 9) Pemetaan dan analisa untuk barak sementara dan akses kepada sanitasi dasar (Mapping and analysis for temporary shelter and access to basic sanitation).
- 10) Bantuan teknis untuk barak sementara dan permukiman (Technical Assistance on temporary shelter and settlements).
- 11) Studi perencanaan air bersih dan sanitasi (Water and Sanitation study and plans).
- 12) Studi infrastruktur dan pemulihan ekonomi (Economic Recovery and Infrastructure study).
- 13) Studi skenario demografi dan ekonomi (Demographic and Economic Scenarios Studies).
- 14) Survey dan analisa demografi untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (Population/demographic survey and analysis for rehab and recons).
- 15) Pemulihan sosial untuk perempuan (Social Recovery for women).
- 16) Prioritas utama dalam tanggap darurat (Immediate Priorities for Response).
- 17) Pemulihan berbasis masyarakat lokal (Local communities-driven recovery).
- 18) Studi sosial (Social Study).
- 19) Survey dan pemetaan anak-anak serta program penanganan anak-anak yatim piatu (Survey and mapping for childrens, orphans treatment programs).
- 20) Studi masalah pendidikan (Education study).
- 21) Pertanian (Agriculture)
- 22) Perikanan (Fisheries).
- 23) Media center untuk masyarakat internasional (Media center for international community).
- 24) Bantuan hukum untuk hak milik dan keluarga (Legal implications asistances on property and family).
- 25) Bantuan militer untuk TNI (Military Assistance for TNI in Aceh Reconstructions.).
- 26) Studi mekanisme pendanaan (Funding Mechanism study).

26) Studi...

- 27) Pemerintahan (Fiduciary and governance).
- 28) Bantuan teknis mekanisme pendanaan (Financial mechanism assistance).
- 29) Kerjasama pembangunan dalam pengembangan sistem deteksi dini bencana alam nasional (Development cooperation on Establishing a National Disaster Early Warning Detection).
- 30) Penanganan bencana alam dan pemulihan masyarakat (Disaster Management and community recovery).
- 31) Bantuan untuk bencana warisan budaya Aceh (Aceh Disaster Heritage Assistance).
- 32) Warisan budaya dan museum untuk bencana Aceh (Heritage and museums for Aceh Disaster).

VI. Tambahan Uraian Tugas dan Produk

Dengan mempertimbangkan ruang lingkup tugas tiga pokja yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu 1) Pokja Tata Ruang dan Pertanahan, 2) Pokja Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta 3) Pokja Prasarana dan Sarana, uraian spesifik dari tugas-tugas ketiga pokja tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. POKJA TATA RUANG DAN PERTANAHAN

a. Uraian Tugas:

Menyiapkan landasan, pendekatan, metodologi, rencana tata ruang, dan tataguna tanah untuk arahan rencana pembangunan sektor-sektor.

b. Produk:

- 1) Rencana rinci tata ruang sampai dengan ketelitian zonasi (zoning plan) dengan skal peta 1 : 5.000 untuk setiap zona dan skala 1 : 1.000 untuk bagian dari zona yang akan dibangun secepatnya (pusat kota, mesjid raya, perkampungan nelayan, relokasi dsb.).
- 2) Rencana rinci penataan zonasi (Zoning Plan) disertai juga instrumen-instrumen pengaturannya:
 - a) Peraturan zonasi (zoning regulation);
 - b) Kriteria, design, standard zonasi (Zoning and building codes).
- 3) Rencana Rinci pengelolaan pertanahan (Land Management Plan) yang berisi:
 - a) Rencana tata guna tanah (land Use Plan) dengan skala 1 : 10.000;
 - b) Rencana Pemulihan Hak atas Tanah (Land Titling Recovery Plan) untuk setiap kapling/persil yang dipulihkan statusnya atau diberikan status yang baru.

c. Masukan...

c. Masukan/Input utama:

- 1) Hasil Penilaian kerusakan, kerugian, potensi dan kebutuhan (damage, loss, potentiality and need assessment).
- 2) Interpretasi citra satelit.
- 3) Pemetaan dasar rupa bumi.
- 4) Data statistik per desa.

d. Pendekatan dasar:

- 1) Pendekatan tata ruang dan pengembangan wilayah/kawasan.
- 2) Delineasi kawasan dengan pendekatan bioregion dan pertimbangan kawasan aman bencana.
- 3) Pendekatan sosial budaya masyarakat Aceh.

e. Jenis Keahlian yang diperlukan untuk:

- 1) Penilaian kerusakan dan kerugian (damage and loss assessment).
- 2) Bantuan teknis untuk penataan ruang, zoning plan, regulation, criteria and design.
- 3) Pengelolaan data citra satelit.
- 4) Pengelolaan data spasial.
- 5) Citra satelit pada 6 wilayah bencana (Satellite Imagery on 6 disaster areas).
- 6) Studi pemulihan hak atas tanah (Land rights recovery study).
- 7) Studi Relokasi Permukiman (Resettlements study).

f. Rencana Kerja Penyusunan:

- 1) Mobilisasi Pokja.
- 2) Penilaian kerusakan dan kerugian per wilayah/kawasan.
- 3) Penyiapan Peta Dasar:
 - a) Peta Dasar regional -> 1 : 50.000
 - b) Peta Dasar Kawasan -> 1 : 10.000
 - c) Peta Dasar Zonasi -> 1 : 5.000
 - d) Peta Dasar untuk Detail Plan -> 1 : 1.000

2. POKJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

a. Uraian Tugas:

- 1) Menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang LH dan SDA yang menjadi masukan atau input awal bagi pokja bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Rencana RR LH dan SDA dirinci ke dalam program kegiatan rehabilitasi dan program kegiatan rekonstruksi yang akan langsung dilakukan oleh berbagai pihak terkait.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana RR LH dan SDA yang disampaikan oleh sektor terkait, pihak dunia usaha, dan masyarakat, terutama waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan lembaga pelaksana.
- 3) Rincian uraian tugas akan antara lain menyangkut pada:
 - a) Lingkungan Hidup
 - b) Sumber Daya Alam

b. Produk:

- 1) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan SDA :
 - a) Rencana Pemulihan Lingkungan Hidup (RKL)
 - b) Kriteria, design, standard pengelolaan LH dan SDA (Environmental zoning codes)

c. Masukan/Input utama:

- 1) Hasil Penilaian kerusakan, kerugian, potensi dan kebutuhan (damage, loss, potentiality and need assessment) dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Rencana rinci penataan zonasi (Zoning Plan) disertai juga instrumen-instrumen pengaturannya:
 - a) Peraturan zonasi (zoning regulation);
 - b) Kriteria, design, standard lingkungan (Environmental zoning codes).
- 3) Interpretasi citra satelit.
- 4) Pemetaan dasar rupa bumi.
- 5) Data statistik per desa.

d. Pendekatan dasar:

- 1) Pendekatan tata ruang dan pengembangan wilayah/kawasan.
- 2) Delineasi kawasan dengan pendekatan bioregion dan pertimbang kawasan aman bencana.
- 3) Pendekatan sosial budaya masyarakat Aceh.

e. Jenis...

e. Jenis Keahlian yang diperlukan untuk:

- 1) Studi pemulihan lingkungan (Environmental recovery study ; mangrove, coral reefs, etc).
- 2) Penilaian kerusakan dan kerugian (damage and loss assessment).
- 3) Untuk data citra satelit.
- 4) Untuk data spasial.
- 5) Citra satelit pada 6 wilayah bencana (Satellite Imagery on 6 disaster areas).
- 6) Pengembangan sistem deteksi dini bencana alam nasional (Establishing a National Disaster Early Warning Detection).

f. Rencana Kerja Penyusunan:

- 1) Mobilisasi kegiatan Pokja dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pihak terkait lainnya.
- 2) Analisis hasil penilaian kerusakan dan kerugian, dan merumuskan kebutuhan rehabilitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam di kawasan dampak bencana.
- 3) Penyusunan kerangka perencanaan dan arahan perencanaan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
- 4) Penyusunan rencana rehabilitasi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
- 5) Hasil integrasi rencana rehabilitasi lingkungan dan sumber daya, selanjutnya dituangkan ke dalam *general framework* rencana secara keseluruhan.
- 6) Penyusunan draft laporan dan bahan presentasi untuk dikonsultasikan dalam konsultasi publik nasional dan daerah.
- 7) Penyempurnaan rincian lokasi rencana rehabilitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

3. POKJA PRASARANA DAN SARANA

a. Uraian Tugas:

- 1) Menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana dan sarana umum. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana dan Sarana dirinci ke dalam program kegiatan rehabilitasi dan program kegiatan rekonstruksi yang akan langsung dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

2. Mengkoordinasikan...

- 2) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana RR sarana dan prasarana yang disampaikan oleh sektor terkait, pihak dunia usaha, dan masyarakat, terutama waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan lembaga pelaksana.
- 3) Rincian uraian tugas antara lain terkait dengan:
 - a. Perumahan dan Permukiman;
 - b. Jalan dan Jembatan;
 - c. Transportasi udara dan laut;
 - d. Energi, Telekomunikasi, dan listrik;
 - e. Air bersih;
 - f. Pasar;
 - g. Prasarana air baku;
 - h. Sungai, irigasi, pantai.

b. Produk:

- 1) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana wilayah yang rusak akibat bencana di Aceh dan Sumut, yang terkait dengan sektor-sektor: prasarana jalan (dan jembatan), perhubungan, irigasi, kelistrikan, telekomunikasi, serta perumahan dan permukiman.
- 2) Rencana kegiatan dan pendanaan yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana yang rusak akibat bencana, yang dirinci menurut lokasi dan telah disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.
- 3) Kriteria, design, standard prasarana dan sarana yang akan direhabilitasi dan dibangun kembali pada lokasi yang telah diarahkan peruntukan ruang wilayahnya.

c. Masukan/Input utama:

- 1) Hasil penilaian kerusakan, kerugian, potensi dan kebutuhan (damage, loss, potentiality and need assessment) dalam bidang prasarana dan sarana wilayah.
- 2) Rencana rinci penataan zonasi (Zoning Plan) disertai juga instrumen-instrumen pengaturannya:
 - a) Peraturan zonasi (zoning regulation);
 - b) Kriteria, design, standard lingkungan (Environmental zoning codes);
 - c) Interpretasi citra satelit;
 - d) Pemetaan dasar rupa bumi;
 - e) Data statistik per desa.

d. Pendekatan...

d. Pendekatan dasar:

- 1) Pendekatan tata ruang dan pengembangan wilayah/kawasan.
- 2) Delineasi kawasan dengan pendekatan bioregion dan pertimbangan kawasan aman bencana.
- 3) Pendekatan sosial budaya masyarakat Aceh.

e. Jenis Keahlian yang diperlukan untuk:

- 1) Pemetaan dan analisa untuk barak sementara dan akses pada sanitasi dasar (Mapping and analysis for temporary shelter and access to basic sanitation).
- 2) Bantuan teknis untuk barak sementara dan permukiman (Technical Assistance on temporary shelter and settlements).
- 3) Studi perencanaan untuk air bersih dan sanitasi (Water and Sanitation study and plans).
- 4) Studi pemulihan ekonomi dan infrastruktur (Economic Recovery and Infrastructure study).

f. Rencana Kerja Penyusunan:

- 1) Mobilisasi kegiatan Pokja dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pihak terkait lainnya.
- 2) Analisis hasil penilaian kerusakan dan kerugian, dan merumuskan kebutuhan rehabilitasi prasarana dan sarana di kawasan dampak bencana.
- 3) Penyusunan kerangka perencanaan dan arahan perencanaan bidang prasarana dan sarana.
- 4) Penyusunan rencana rehabilitasi prasarana dan sarana.
- 5) Hasil integrasi rencana rehabilitasi prasarana dan sarana, selanjutnya dituangkan ke dalam *general framework* rencana secara keseluruhan.
- 6) Penyusunan draft laporan dan bahan presentasi untuk dikonsultasikan dalam konsultasi publik nasional dan daerah.
- 7) Penyempurnaan rincian lokasi rencana rehabilitasi prasarana dan sarana secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

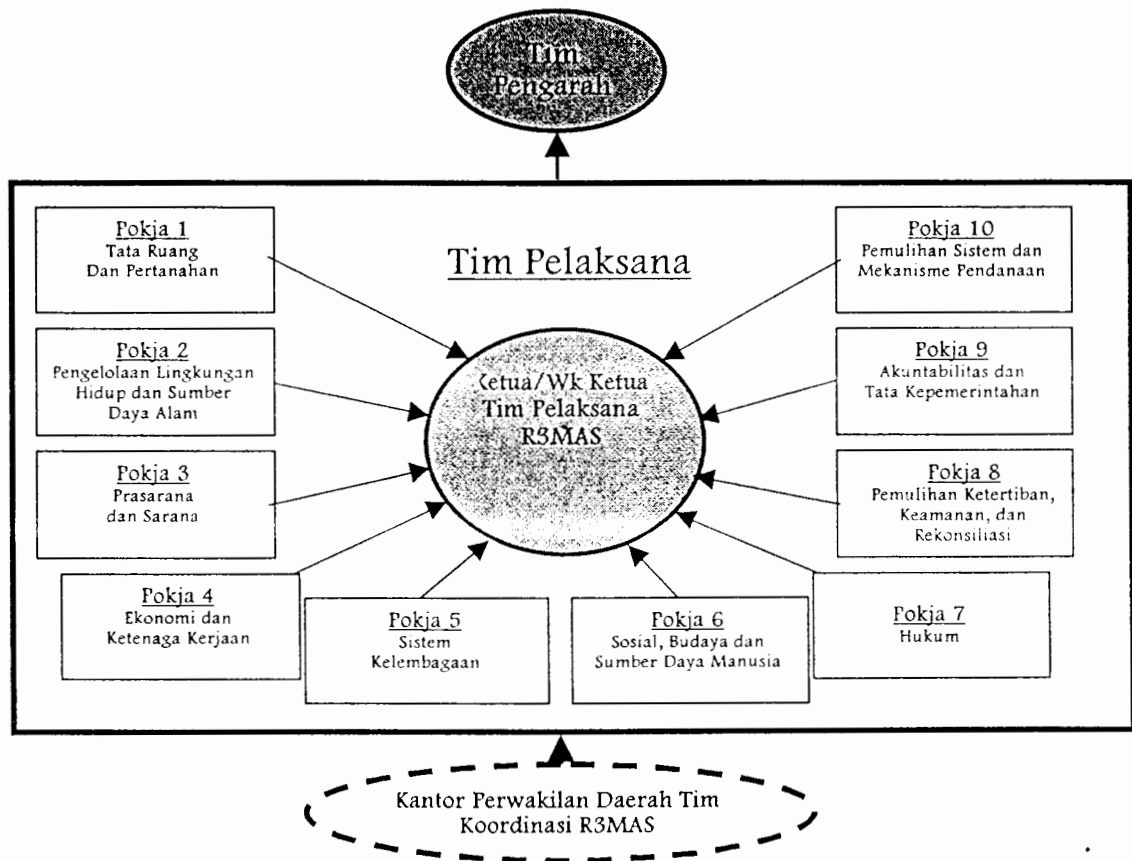
LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 007 /M.PPN/02/2005

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2005

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA
KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS)



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

[Signature]
DR. SRI MULYANI INDRAWATI